

TESIS

**PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
NASIONAL SERENTAK**



Diajukan oleh:

FADHLI AL HUSAINI

NIM 1820112030

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Khairaini, SH.,MH**
- 2. Dr. Khairul Fahmi, SH.,MH**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

***PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL
SERENTAK***

**(Fadhli al Husaini, 1820112030, Magister Hukum Universitas Andalas, 145
halaman, Tahun 2022)**

ABSTRAK

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menerangkan “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan dalam Pasal 6A ayat (2) menyebutkan subjek hukum yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik/gabungan partai politik. Mekanisme terkini pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga berisi tentang sistem penyelenggaraan pemilu. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut memberikan syarat pada partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden wakil presiden adalah yang memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara pemilu DPR nasional yang kemudian dikenal dengan *presidential threshold*. Keberadaan norma *presidential threshold* tersebut memberi konsekuensi bahwa tidak serta-merta partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah 1. Apa hakikat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 2. Kenapa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) diatur dan diterapkan dalam pemilu nasional serentak 3. Bagaimana konstusionalitas norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu nasional serentak. Penulis menggunakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang norma *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disimpulkan bahwa norma tersebut merupakan norma yang bermasalah secara konstusional karena mengamputasi hak konstusional partai politik peserta pemilu dalam Pasal 6A ayat (2) dan melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) tentang persamaan dihadapan hukum dan jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Norma *presidential threshold* tersebut juga tidak memiliki rasionalitas dan relevansi dalam penerapannya pada pemilihan umum yang diselenggarakan serentak. Penerapan dan penormaan *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga bertolak belakang dengan semangat pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan alasan/tujuan untuk membangun pemerintahan yang berkesinambungan dalam sistem pemerintahan presidensial yang stabil, efektif dan kuat.

Kata Kunci: Ambang Batas, Presiden, Pemilihan Umum

Application of The Presidential Threshold in Holding Simultaneous National Elections

(Fadhli al Husaini, 1820112030, Magister Hukum Universitas Andalas, 145 pages, 2022)

Article 6A paragraph (1) of the 1945 Constitution explains "The president and vice president are elected in one pair directly by the people" and Article 6A paragraph (2) states that legal subjects who can nominate pairs of presidential and vice presidential candidates are political parties/aggregation of political parties. . The current mechanism for direct election of the president and vice president by the people is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which also contains the system for administering elections. Article 222 of Law Number 7 of 2017 provides conditions for political parties and a combination of political parties participating in the election to be able to nominate a pair of presidential and vice-presidential candidates who obtain 20% of the DPR seats or 25% of the national DPR election votes, which is then known as the presidential threshold. The existence of the presidential threshold norm has the consequence that the political parties participating in the election are not automatically able to nominate pairs of presidential and vice presidential candidates. The problems that will be examined in this thesis are 1. What is the nature of the threshold for the nomination of president and vice president. 2. Why is the threshold for the nomination of president and vice president (presidential threshold) regulated and applied in simultaneous national elections 3. What is the constitutionality of the threshold norm for presidential and vice presidential nominations in simultaneous national elections. The author uses descriptive normative or doctrinal research with qualitative analysis. Based on the results of research on the presidential threshold norm in Article 222 of Law Number 7 of 2017, it is concluded that this norm is a constitutionally problematic norm because it amputates the constitutional rights of political parties participating in elections in Article 6A paragraph (2) and violates Article 27 paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) regarding equality before the law and guarantees of protection against discriminatory treatment. The presidential threshold norm also lacks rationality and relevance in its application to simultaneous general elections. The application and normalization of the presidential threshold in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is also contrary to the spirit of purifying the presidential government system in Indonesia and the reasons/objectives to build sustainable government in a stable, effective and strong presidential government system.

Keywords: Threshold, President, General Election

